



Menyongsong Masyarakat Sadar Hukum: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dan Kerjasama Dalam Penegakan Keadilan

Emellya Fridamayanti¹, Muhammad Iqbal Muzakki², Putri Octa Ivani³, Wahjoe Pangestoeti⁴

¹⁻⁴Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

Korespondensi Penulis : emellyamayanti@gmail.com*

Abstract. Citizenship education is very important to instill legal awareness, principles of justice, and an understanding of human rights. This education provides a deep understanding of the constitution, judicial system, human rights, and various other laws. This not only increases public awareness of the importance of obeying the law, but also instills good ethics and morals in individuals through values such as honesty, justice and social responsibility. In addition, the values of Pancasila serve as the main foundation in shaping the character of citizens. good country. It is hoped that the next generation will become citizens who are aware of their rights and obligations as members of society and are able to defend the values of Pancasila. The state and society are responsible for fighting crime, including unsolved murder cases. It is very important for law enforcement agencies and the community to work together to ensure that the legal process is fair and transparent and provides appropriate protection to victims and their families. Through active community participation in providing information and support to law enforcement agencies, criminal cases can be uncovered and resolved appropriately, resulting in a safer and fairer environment for everyone.

Keywords: Citizenship Education, Legal Awareness, Principles Of Justice, Human Rights, Ethics, Morals, Pancasila, Law Enforcement, Collaboration, Society,

Abstrak. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk menanamkan kesadaran hukum, prinsip keadilan, dan pemahaman tentang hak asasi manusia. Pendidikan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konstitusi, sistem peradilan, hak asasi manusia, dan berbagai undang-undang lainnya. Ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum, tetapi juga menanamkan etika dan moral yang baik pada individu melalui nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan utama dalam membentuk karakter warga negara yang baik. Diharapkan generasi berikutnya akan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat dan mampu mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Negara dan masyarakat bertanggung jawab memerangi kejahatan, termasuk kasus pembunuhan belum diselesaikan. Sangat penting bagi lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk bekerja sama untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan serta memberikan perlindungan yang layak kepada korban dan keluarganya. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan dukungan kepada lembaga penegak hukum, kasus kejahatan dapat diungkap dan diselesaikan dengan tepat, yang menghasilkan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua orang.

Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Kesadaran Hukum, Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia, Etika, Moral, Pancasila, Penegakan Hukum, Kolaborasi, Masyarakat,

PENDAHULUAN

Secara teoritis, pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antar individu dan kelompok, serta hubungan antar individu dan negara mereka sendiri (Wuryan, 2008) Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membina warga negara dan generasi yang akan meneruskan bangsa untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Pendidikan kewarganegaraan juga menanamkan sikap bela negara dan cinta tanah air (Nurdiansyah, E., El Faisal, E., & Sulkipani, 2021) sangat penting bagi anak-anak yang baru memasuki jenjang SD karena pendidikan kewarganegaraan harus membentuk

moralitas dan karakter yang baik dari usia kanak-kanak (Febrianti, N., & Dewi, 2021) Kewarganegaraan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), yang harus dilindungi oleh masyarakat secara keseluruhan selama kehidupan di negara tersebut. Namun, mayoritas generasi saat ini tidak memiliki sifat dan kebiasaan yang tepat untuk menjadi warga negara. Mereka tidak menganut nilai-nilai Pancasila dan tidak memahami apa artinya menjadi warga negara. Pelanggaran hak asasi manusia telah meningkat seiring berjalannya waktu sebagai akibat dari tindakan orang-orang yang tidak berkewarganegaraan, yang sekarang mencakup anak-anak sampai dewasa. Selain itu, sejumlah besar individu telah kehilangan hak asasi manusia mereka.

Nilai-nilai Pancasila adalah prinsip dan landasan utama yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kepercayaan dan ideologinya sendiri. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang mengatur kehidupan nasional untuk membangun negara yang memiliki kedaulatan, keadilan, dan aturan (Safitri dkk, 2021). Negara akan hancur tanpa Pancasila, dan masyarakat akan berkembang menjadi liberalisme. Pancasila memiliki tujuan untuk menyatukan bangsa, serta untuk menciptakan kehidupan bernegara yang teratur, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Memiliki tujuan yang sama—membentuk karakter bangsa dan memiliki—Pancasila terkait dengan kewarganegaraan. moral yang dia ikuti dalam hidupnya. Namun, dapat dikatakan bahwa sangat sedikit orang di dunia saat ini yang masih menganut nilai-nilai Pancasila dan memiliki kewarganegaraan. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah disebutkan di atas terjadi sebagai akibat dari hilangnya hal ini. Sebagai contoh, kasus pembunuhan yang belum terselesaikan merupakan permasalahan serius yang berdampak pada keselamatan dan keadilan masyarakat. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana pendidikan kewarganegaraan dan penegakan hukum dapat berkontribusi dalam menangani kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam menangani kasus-kasus pembunuhan yang belum terpecahkan tidak perlu dipertanyakan lagi. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menumbuhkan budaya menghormati hukum dan keadilan. penting dalam menyelesaikan kejahatan seperti pembunuhan. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga dapat membantu mengurangi frekuensi pembunuhan dengan mendorong kohesi sosial dan keterlibatan masyarakat, yang merupakan faktor penting dalam mencegah kejahatan. Sebaliknya, hukum adalah penting dalam penyelesaian kasus pembunuhan yang tidak terselesaikan. Penegakan hukum secara efektif memerlukan kombinasi sumber daya, keahlian, dan keterlibatan masyarakat. Lembaga penegak hukum harus memiliki sumber daya dan teknologi yang

diperlukan untuk menyelidiki kejahatan secara menyeluruh dan mengumpulkan bukti. Selain itu, lembaga penegak hukum harus melibatkan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan mengumpulkan informasi yang dapat membantu penyelidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui inisiatif perpolisian masyarakat, di mana aparat penegak hukum bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk membangun kepercayaan dan mengumpulkan informasi yang dapat membantu penyelidikan. Akhir kata, pembunuhan yang tidak terselesaikan Kasus merupakan masalah serius yang memerlukan pendekatan multifaset. Pendidikan kewarganegaraan dan penegakan hukum merupakan dua komponen kunci dari pendekatan ini. Dengan mendidik warga negara tentang hak dan tanggung jawab mereka serta memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam mencegah dan melaporkan kejahatan, pendidikan kewarganegaraan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menangani kasus-kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Demikian pula, lembaga penegak hukum harus memiliki sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk menyelidiki kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menggambarkan fenomena dalam konteks yang lebih luas. Di dalam. Dengan menggunakan metode studi literatur jurnal—proses penelitian yang melibatkan tinjauan dan analisis literatur sebelumnya—metode ini memungkinkan pengumpulan data deskriptif melalui analisis jurnal sebelumnya. Seperti mengakhiri dan mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang. Studi literatur jurnal dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kemajuan pengetahuan saat ini, menemukan celah dalam penelitian, dan memberikan konteks untuk penelitian baru.

Mengkaji jurnal-jurnal yang sudah ada dapat menunjukkan peran penting Pendidikan Kewarganegaraan sebagai perantara bagi bangsa Indonesia untuk lebih memahami apa itu. undang-undang, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan prinsip moral, serta tujuan untuk membangun bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Jika seseorang menanamkan nilai-nilai ini, maka hak dan kewajiban mereka akan dipenuhi. Selain itu, penelitian ini menganalisis beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang beredar di media sosial yang menunjukkan orang atau kelompok yang tidak bermoral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat membantu penegakan hukum di Indonesia. Namun, pendidikan kewarganegaraan seringkali hanya diajarkan di kelas. Pendidikan penting untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari, terutama

moral, dengan mengajarkan ilmu pengetahuan tanpa lebih menekankan pada aspek sikap dan keterampilan. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam penegakan hukum, seperti yang berikut:

A. Memahami hukum

Pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan memberikan pemahaman yang luas tentang konstitusi, sistem, dan peradilan, hak asasi manusia, dan undang-undang lainnya. Masyarakat dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan menghindari pelanggaran hukum dengan pemahaman yang baik tentang hukum. Pendidikan kewarganegaraan meningkatkan pemahaman tentang hukum dan peraturan Indonesia. Siswa dapat mempelajari hak asasi manusia, sistem peradilan, prinsip dasar hukum, dan aturan hukum lainnya melalui mata pelajaran ini. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti hukum dan menghormati proses hukum yang berlaku. Dengan meningkatnya kesadaran tentang peran dan tanggung jawab warga negara dalam bidang hukum melalui Pendidikan Kewarganegaraan, generasi muda memiliki arah dalam penentuan posisi sebagai penduduk Indonesia. Pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipahami melalui pendidikan kewarganegaraan. Jika generasi muda diberi nilai yang baik, mereka akan menjadi generasi yang baik. Konsep penegakan hukum mengajarkan generasi tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bangsa (Ulfa, Mufidah, C.H., Susilawati, S., & Barizi, 2022) Dengan memberikan gagasan penegakan hukum kepada generasi muda, mereka akan menghindari perilaku negatif.

B. Memahami Hak Dan Kewajiban

Sangat penting untuk memahami bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum agar lingkungan menjadi aman dan tertib. Pendidikan tentang Kewarganegaraan dapat mendorong orang untuk terlibat dalam proses hukum, seperti melaporkan kejahatan, menjadi saksi, atau bertindak sebagai juri. Masyarakat dapat membantu menjaga keadilan dan ketertiban dengan memahami peran mereka dalam sistem hukum. Pendidikan kewarganegaraan membantu meningkatkan kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Pelajardiajarkan tentang hak-hak dasar warga negara dan kewajiban mereka untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan. Dengan memahami hak dan kewajiban ini, masyarakat akan lebih baik. dapat terlibat secara aktif dalam penegakan hukum.

C. Pembentukan Etika dan Moral

Pendidikan kewarganegaraan membentuk etika dan moral yang baik pada individu melalui nilai-nilai yang diajarkan. Siswa dapat menginternalisasikan prinsip-prinsip

kewarganegaraan seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka lebih cenderung hidup sesuai dengan hukum dan mendukung keadilan di masyarakat (Darlis et al., 2023).

D. Berpartisipasi dalam Proses Hukum

Pendidikan kewarganegaraan memberi siswa kesempatan untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses hukum. Dengan menggunakan simulasi pengadilan, Siswa dapat melihat secara langsung bagaimana sistem peradilan berfungsi dengan melakukan perdebatan hukum atau mengunjungi lembaga peradilan. Hal ini mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya memperjuangkan keadilan (Lubis, 2024).

Pendidikan kewarganegaraan membantu orang lebih memahami hukum dengan mengajarkan mereka tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Membantu meningkatkan kesadaran hukum komunitas. Hal ini dapat membantu orang menghormati hukum, memahami aturan, dan menjaga ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk membangun masyarakat yang patuh terhadap hukum. Mengajarkan tentang nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan dapat membangun masyarakat yang memiliki kesadaran moral dan etika dalam menjalankan kehidupan nasional dan internasional. Masyarakat yang patuh terhadap hukum yang kuat akan menjadi mitra yang aktif dalam menjaga keamanan negara. Selanjutnya, pengembangan kurikulum yang sesuai untuk Pendidikan.

E. Penegakan Hukum: Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat

Penegakan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memerangi kejahatan, termasuk pembunuhan. Untuk menyelesaikan kasus pembunuhan yang terjadi dalam situasi seperti ini, penegakan hukum harus bekerja dengan baik dan adil. Penegakan hukum terdiri dari beberapa langkah yang kompleks, seperti penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Selama proses ini, penegakan hukum harus memastikan bahwa investigasi dilakukan dengan profesional dan tidak diskriminatif, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan adil. Penegakan hukum juga harus memastikan bahwa pelaku kejahatan, termasuk pembunuhan, diadili secara adil dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterpaksaan atau dorongan daya paksa yang dapat menjadi alasan untuk menghapus tindak pidana pembunuhan. Dalam hal ini, penegakan hukum harus memastikan bahwa Proses hukum berjalan secara adil (Lubis & Ritonga, 2023).

Selain itu, penegakan hukum harus memastikan bahwa korban dan keluarga mereka menerima perlindungan hukum yang tepat dan kompensasi yang sesuai dengan hukum. Korban dan keluarga mereka mungkin memerlukan bantuan emosional dan psikologis untuk mengatasi trauma yang disebabkan oleh pembunuhan.

Penegakan hukum membutuhkan keterlibatan masyarakat. Dengan memberikan informasi dan menjadi saksi, masyarakat harus membantu penegakan hukum. Pendidikan kewarganegaraan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum untuk mencegah kejahatan seperti pembunuhan.

Negara harus memastikan bahwa sistem peradilan beroperasi dengan baik karena penguatan sistem peradilan sangat penting untuk penegakan hukum. Pendidikan petugas hukum dan penegakan hukum dapat lebih baik dengan investasi dalam teknologi forensik. Oleh karena itu, penegakan hukum dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memerangi kejahatan dan menjamin keadilan (Ritonga et al., 2023).

Secara keseluruhan, penegakan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memerangi kejahatan, termasuk pembunuhan. Penegakan hukum harus beroperasi dengan efektif dan transparan, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili secara adil dan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. Untuk memastikan keadilan ditegakkan dan kejahatan tidak terjadi lagi, keterlibatan masyarakat dan penguatan sistem peradilan sangat penting.

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk menanamkan kesadaran hukum, prinsip keadilan, dan pemahaman tentang hak asasi manusia. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan orang-orang tentang konstitusi, sistem peradilan, hak asasi manusia, dan undang-undang lainnya. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti hukum dan menghormati proses hukum yang berlaku. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial untuk menanamkan etika dan moral yang baik dalam diri seseorang.

Selain itu, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan utama dalam membentuk karakter warga negara yang baik. Dengan menanamkan nilai-nilai ini pada anak-anak, generasi berikutnya diharapkan dapat menjadi warga negara yang menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat.

Negara dan masyarakat juga harus menerapkan hukum. melawan kejahatan, termasuk pembunuhan yang belum selesai. Untuk menjamin proses hukum yang adil dan transparan, lembaga penegak hukum dan masyarakat harus bekerja sama. Karena partisipasi masyarakat yang aktif dalam memberikan informasi dan dukungan kepada penegak hukum, kasus kejahatan, termasuk pembunuhan, dapat diungkap dan diselesaikan dengan cepat, sehingga korban dan keluarganya menerima perlindungan yang layak.

SARAN

Meningkatkan program pendidikan kewarganegaraan dengan mengutamakan pengetahuan tentang hukum, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia. Selain itu, sangat penting untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membantu lembaga penegak hukum menyelesaikan kasus kejahatan, termasuk pembunuhan yang belum terselesaikan. Kerja sama yang erat antara masyarakat dan lembaga penegak hukum dapat membuat tempat yang lebih aman dan adil bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Darlis, A., Lubis, Y., Hasibuan, A., Alamsyah, M., & Ramadhan, W. (2023). Moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam di SMK Harum Sentosa Perbaungan. *Journal on Education*, 5(3), 6912-6919. Retrieved from <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1474>
- Febrianti, N., & Dewi, D. A. (2021). Pengembangan nilai moral peserta didik dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 476-482.
- Lubis, Y. W. (2023). Pembentukan karakter unggul: Analisis optimalisasi pendidikan melalui Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) di MAN 2 Deli Serdang. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 274-282. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.554>
- Lubis, Y., & Ritonga, A. (2023). Mobilization school program: Implementation of Islamic religious education teacher preparation in elementary schools. *Jurnal At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.37758/jat.v6i1.632>
- Nurdiansyah, E., El Faisal, E., & Sulkipani, S. (2021). Pengembangan ensiklopedia identitas nasional berbasis kearifan lokal. *Urnal Civic Hukum*, 6(2).
- Ritonga, A. A., Lubis, Y. W., Masitha, S., & Harahap, C. P. (2022). Program sekolah penggerak sebagai inovasi meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 104267 Pegajahan. *Jurnal Pendidikan*, 31(2), 195-206. <https://doi.org/10.32585/jp.v31i2.2637>
- Safitri, dkk. (2021). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk pribadi yang berkarakter pada anak sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5328-5335.

Ulfa, M., Mufidah, C. H., Susilawati, S., & Barizi, A. (2022). Multicultural Islamic education in Indonesia: The urgency value of model and method. *Addin*, 16(1), 131-164.

Wuryan, S., & Wuryan, S. (2008). Ilmu kewarganegaraan (Civics). Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.